

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi, istilah "demokrasi" berasal dari kata "*demos*", yang merujuk kepada rakyat, dan "*Kratos*" atau "*Kratein*", yang mengindikasikan kekuasaan atau pemerintahan¹. Indonesia adalah negara demokrasi, di negara demokrasi menempatkan peran partisipasi rakyatnya dalam melakukan pemilihan kepemimpinan di Negara tersebut. Seperti halnya di Indonesia sendiri wujud demokrasi tertung dalam Pemilihan umum (Pemilu). Kehadiran pemilu di Indonesia dengan konsep demokrasi maka munculah kelompok aspirasi yang akan menjadi wadah keterwakilan rakyat dalam berdemokrasi yakni adanya Partai Politik².

Salah satu wujud dari demokrasi dalam konteks bernegara di Indonesia adalah Pemilihan Umum (Pemilu), bagian dari pemilu salah satunya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) telah menjadi kesepakatan politik yang diterima secara luas di tingkat nasional, dan menjadi alat vital dalam menjalankan pemerintahan setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia.

¹ Miriam Budiarjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 50

² Rowland B.F. Pasaribu, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, https://www.related:rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 13.55

Sejak era kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan.

Pada awalnya, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun kemudian beralih ke sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Namun, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masyarakat menentangnya karena sistem pemilihan tidak langsung dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi³.

Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan undang-undang tersebut dan mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat⁴. Akibatnya, mekanisme pemilihan kepala daerah yang sebelumnya tidak langsung kembali menjadi pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat. Keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah haruslah memenuhi beberapa persyaratan diantaranya kontestasi calon kepala daerah haruslah dari gabungan beberapa partai yang membentuk kolisi yang memenuhi ambang batas.

Adapun syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sedikitnya 20 persen jumlah kursi DPRD atau 15 persen akumulasi suara sah pemilihan anggota DPRD di daerah tersebut. Oleh karena aturan inilah kemudian para partai yang memiliki visi yang sama bersatu mengusung pasangan calon dalam Pilkada tersebut. Namun selain calon yang berasal dari gabungan partai politik ada juga pencalonan yang

³ Mustafa Lutfi, *"Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi"*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

⁴ *Ibid*, Mustafa Lutfi

dapat di tempuh tanpa partai politik atau yang di kenal dengan sebutan pasangan atau calon Independen dengan syarat minimal mengumpulkan.

Berdasarkan PKPU No 3 tahun 2017 Pasal 10 syarat minimal dukungan calon perseorangan itu bervariasi berdasarkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Untuk pemilihan gubernur, syarat minimal dukungan calon perseorangan ialah 10% untuk DPT 2 juta, 8,5% untuk DPT 2 juta-6 juta, 7,5% untuk DPT 6 juta-12 juta, dan 6,5% untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta. Adapun syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju di tingkat bupati/wali kota ialah 10% untuk jumlah DPT hingga 250 ribu; 8,5% untuk DPT 250 ribu-500 ribu, 7,5% untuk DPT 500 ribu-1 juta, dan 6,5% untuk DPT di atas 1 juta.⁵

Untuk hal itulah kemudian pencalonan kepala daerah melalui calon perseorangan begitu jarang di temui di karenakan persyaratan yang dianggap begitu berat. Sehingga pencalonan kepala daerah melalui usungan koalisi partai masih sangat mendominasi jalannya pemilu terutama Pilkada di Indonesia saat ini. Namun pencalonan pasangan dari koalisi atau gabungan partai bukanlah hal yang bisa dikatakan mudah ada banyak hal yang perlu di pertimbangkan dengan bijak karena akan banyak dinamika didalamnya.

Oleh karena itu partai politik saling berkomunikasi untuk menjalin kerjasama agar mampu mencalonkan pasangannya yang tentunya terpenuhi ambang batas tersebut dengan kata lain penggabungan antara beberapa partai politik disebut atau dikenal dengan koalisi.

Atau ilmuwan dunia menjelaskan koalisi merupakan gabungan, koalisi merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang saling menguntungkan, Dalam politik koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu

⁵ Media Indonesia, *Calon Independen Diminta Syarat Dukungan*. Di akses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/290983/calon-independen-diminta-siapkan-syarat-dukungan> Pada 17 Oktober 2023, Pukul 12.52 WIB

pemerintahan. Koalisi merupakan suatu soal yang tak bisa dihindari dalam proses politik negara yang menganut sistem multipartai.⁶

Koalisi sangat penting dilakukan disamping memenuhi syarat pencalonan juga menjadi salah satu ajang pemilihan figure politik yang dianggap pantas menjadi calon andalanya. Selain kekuatan eksistensi yang dimiliki oleh figur calon, partai politik juga sebagian besar tak mampu untuk mencalonkan kader sekaligus menjadi figur politik yang dianggapnya ideal, kebanyakan parpol di Indonesia malah mencalonkan figure yang berada di luar partai atau non partai. Telah banyak yang terjadi dalam dinamika ini. Salah satu contoh pencalonan gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 yang mencalonkan bukan dari kadernya melainkan dari non atau luar parpol yakni pasangan Anies – Sandiaga. Keduanya bukanlah tercatat sebagai kader partai namun karena memiliki potensi maka dipilih dan dicalonkan oleh gabungan koalisi pendukungnya.

Koalisi terbentuk sudah semestinya telah memiliki kesepakatan bersama antara seluruh anggota partai yang berkoalisi, tidak ada yang di rugikan, tidak ada yang mengenyampingkan kepentingan salah satu pihak anggota koalisi dan sudah pasti haruslah memiliki keuntungan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan partai koalisi oleh sebab itu, dari penjelasan ringkas diatas mengenai fungsi dan urgensi sebuah koalisi partai diatas maka penulis menjadi tertarik dalam membahas mengenai konsep koalisi dan gaya komunikasi politik yang dilakukan salah satu partai koalisi yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada serentak tahun 2020 lalu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

⁶ Lijphart, Arend. (*Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada edisi baru 2015. Hlm 55.

Penulis menganggap bentuk keberanian dari partai Koalisi Berkah yang terdiri dari partai PAN, PKS dan Gerindra. Mengambil langkah untuk mengusung kedua kader murni hanya dari partai PAN tidak dari kedua partai lainnya maju dalam satu paket atau satu pasang calon. Dan kemudian seperti yang peneliti ketahui pada saat itu kabupaten tanjung barat pada pilkada serentak lalu diikuti oleh 3 pasang calon yang notabene bukan orang-orang baru atau sudah memiliki track record di kabupaten tanjung jabung barat. Berikut daftar calon dan partai pengusung pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 lalu.

Tabel. 1.1
Daftar Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung (Koalisi)	Asal Parpol Calon	
			Bupati	Wakil Bup
1.	Mulyani Siregar dan M. Amin	PDI-P, Golkar dan PPP (Koalisi Mulia)	PDI-P	Non Partai
2.	Anwar Sadat dan Hairan	PAN, PKS dan Gerindra (Koalisi Berkah)	PAN	PAN
3.	Muklis dan Supardi	PKB, NasDem dan PBB (Koalisi Beda)	PKB	Non Partai

*Sumber: Situs Resmi KPU Tanjung Jabung Barat**

Penulis menganalisis langkah politik yang diambil Koalisi Berkah dalam mengusung calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung barat tahun 2020 lalu untuk memberi keputusan, mengusung dua kader PAN dan bagaimana pola komunikasi yang dilakukan partai koalisi ini sehingga pasangan ini dapat di sahkan dan dipilih dalam keputusan bersama. Tidak ada partai yang keberatan jika yang di usung merupakan dua kader dari PAN itu sendiri tentunya memiliki pertimbangan yang matang dan pola koordinasi yang baik juga. Jika dilihat dari proposional kursi anggota di DPRD, PAN memang memiliki jumlah

kursi yang lebih banyak yakni 5 kursi sedangkan Gerindra 3 kursi dan PKS hanya 2 kursi. Namun hal ini bukanlah alasan kenapa Koalisi Berkah hanya mengusung pasangan calon hanya dari satu partai pengusung, seperti pada contoh kasus pemilihan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur yang mana calon Gubernur dari partai PAN berjumlah 7 kursi dan Wakil Gubernur dari PKB hanya 4 kursi. Dan banyak lagi contoh lainnya. Perihal keputusan politik ini jelas telah memiliki pertimbangan, sebab koalisi dibentuk dengan asas keadilan dan dapat mengakomodir seluruh anggota koalisi didalamnya.

Menurut informasi yang di dapatkan penulis dari sumber referensi dan budaya politik di Tanjung Jabung barat, jika wilayah ini memiliki pembagian wilayah yang dirasakan sangat berpengaruh dalam memenangkan pilkada disana, sebab Tanjung Jabung Barat di bagi menjadi dua bagian yakni bagian ilir dan bagian hulu atau dikenal dengan Tungkal Ilir dan Tungkal Ulu. Oleh sebab itu pemilihan calon yang merupakan keterwakilan dan potensial berdasarkan wilayah ini sangat menjadi pertimbangan dalam penentuan calon pasangan pada pilkada di Tanjung Jabung Barat

Seperti dilihat dari profil dua figur PAN ini Pasangan calon dengan nomor urut 2 Anwar Sadat yang berpasangan dengan Hairan, keduanya merupakan kader potensial yang dimiliki oleh partai amanat nasional (PAN). Anwar sadat yang dikenal sebagai tokoh masyarakat serta tokoh agama yang lahir dari pemuka agama terkemuka di Tanjung Jabung Barat bahkan Provinsi Jambi yang juga pendiri dan pengasuh pesantren terbesar di Tanjung Jabung Barat, juga bukanlah nama baru yang muncul pasalnya Anwar Sadat pernah mencalonkan diri sebagai bupati pada

periode 2015-2020 lalu namun gagal, kegagalan tersebut terwujud ketika beliau berhasil memenangkan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024. Dan Anwar Sadat sendiri merupakan putra daerah asal Tungkal⁷.

Tingkat popularitas Anwar Sadat di Tungkal ilir tidak diragukan lagi, bukti keberhasilannya yang menang pada pileg DPRD Provinsi Jambi menjadi modal besar partai dalam mengusung Anwar sadat sebagai calon bupati. Sedangkan wakilnya Hairan merupakan tokoh masyarakat yang dua periode memenangkan pemilihan kepala desa Dusun Mudo dan kepala desa Lubuk Sebontan Kaupaten Tanjung Jabung barat. Serta Hairan juga pernah berkarir sebagai anggota DPRD Tanjung Jabung Barat periode 2019-2020 Fraksi Partai PAN.⁸ Mantan kades di dua Desa dan Dapil DPRD Tanjung Jabung Barat bagian Ulu menunjukkan jika elektabilitas Hairan di Tungkal bagian Ulu sangatlah besar dan dirasakan sanagat cocok disandingkan dengan Anwar Sadat yang secara basis menguasai Tungkal ilir oleh sebab itu alasan kuat ini menjadi dasar pertimbangan Koalisi Berkah dalam mengusungnya.

Selain calon Anwar Sadat dan Hairan diatas pilkada Tanjung Jabung Barat tahun 2020 diatas juga di ikuti oleh dua pasang calon yang lain yang mana kedua calon-calon ini juga bukanlah figur atau orang-orang biasa oleh karena itu bentuk keberanian koalisi berkah mengusung dua calon dari satu partai sekaligus walaupun partai tersebut juga bukanlah partai pemenang pada pemilu 2019 di

⁷ Akses Jambi, “*sekilas dan latar belakang profil Amin, wakil Mulyani di Pilkada Tanjabbarat*” <https://aksesjambi.com/akses/08/07/2020/sekilas-latar-belakang-dan-profil-amin-wakil-mulyani-di-tanjab-barat/> diakses pada 13 Februari 2023, pukul 15.23 WIB

⁸ Profil Baru.com, “*Anwar Sadat (Politikus)*”. [https://profilbaru.com/Anwar_Sadat_\(politikus\)](https://profilbaru.com/Anwar_Sadat_(politikus)) diakses pada 15 Januari 2023 pukul 09.02 WIB.

Tanjung Jabung Barat. Berikut profil dari kedua pasangan calon yang menjadi pesaing pasangan Anwar sadat-hairan pada pilkada lalu.

Diantaranya, Pasangan calon nomor urut 1 yang diusung oleh koalisi Mulia yang terdiri dari koalisi partai pemenang pemilu seperti PDI-P, Golkar dan PPP calon Bupati Mulyani Siregar, secara basis berada di Tungkal Ulu dan calon Wakil Bupati Muhammad Amin Abdullah yang masih saudara dari Anwar Sadat calon bupati no urut 2 diatas memiliki basis di Tungkal ilir. Sosok Mulyani Siregar merupakan Ketua DPRD dua periode Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat ini sedang mencalonkan diri untuk melanjutkan trah kakaknya Syafrial yang juga merupakan mantan bupati Tanjabbar 2 periode⁹.

Melalui partai besutannya bukanlah hal yang sulit, ditambah lagi PDI-P selalu menjadi basis masa kemenangan di setiap pemilihan terbukti pada pileg 2019 lalu PDI-P merupakan pemenang. Sedangkan sosok wakilnya Amin atau Muhammad Amin Abdullah yang merupakan anak ketiga, dari KH. Abdullah Bin Syeik KH. Abdul Wahab Bin KH Ismail Nagara yang merupakan salah satu ulama di Tanjab Barat. Selain itu Amin berkarier sebagai aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi¹⁰.

Pasangan calon nomor urut 3 yang diusung oleh koalisi Beda terdiri dari Partai NasDem, PKB dan PBB, calon Bupati H. Muklis. Dan calon Wakil Bupati Supardi. Pasangan ini yaitu pasangan Muklis dan supardi juga bukanlah tokoh yang asing

⁹ Jambi Prima, “*Ini profil bakal calon bupati Tanjung Jabung Barat, Mulyani Siregar*”. <https://jambiprima.com/read/2020/07/04/10996/ini-profil-bakal-calon-bupati-tanjabbar-mulyani-siregar> diakses pada 14 Januari 2023 pukul. 15. 45 WIB.

¹⁰ Akses Jambi, “*sekilas dan latar belakang profil Amin, wakil Mulyani di Pilkada Tanjabbarat*”. <https://aksesjambi.com/akses/08/07/2020/sekilas-latar-belakang-dan-profil-amin-wakil-mulyani-di-tanjab-barat/> diakses pada 14 Januari 2023, pukul 15.23 WIB

bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat namun sama-sama berasal dari Tungkal bagian ilir. Muklis merupakan pejabat kementerian desa dan daerah tertinggal dengan jabatan Sekretaris Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sesditjen PPMD). Dan Muklis juga merupakan mantan sekretaris daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa kepemimpinan bupati Usman Ermulan. Sedangkan wakilnya Supardi sendiri merupakan tokoh masyarakat wilayah Tungkal Ulu yang berasal dari etnis Jawa yang sangat dikenal masyarakat. Supardi juga merupakan ketua dewan cabang persatuan setia hati terate (PSHT) Tanjab Barat yang memiliki anak cabang diseluruh wilayah Kecamatan¹¹.

Jika dilihat dari para profil pasangan calon diatas lawan dari pasangan Anwar Sadat-Hairan bukanlah orang-orang biasa melainkan memiliki kekuatan politik masing-masing apa lagi pada paslon nomor urut 1 yang *notabene* merupakan adik dari bupati petahana saat itu dan juga ketua partai pemenang saat ini di legislatif Tanjung Jabung Barat. Jelas tentu banyak pertimbangan yang dilakukan oleh koalisi Berkah sehingga mengusung hanya dari satu partai saja, apa lagi Anwar sadat memiliki cactan kekalahan saat pertama kali mencalonkan diri sebagai Bupati pada periode sebelumnya.

Jika dilihat dari penjelasan mengenai ketokohan diatas yang diusung oleh koalisi Berkah figur Anwar Sadat- Hairan, memang kedua figur memiliki modal karismatik yang mumpuni dan tidak bisa disebut bukan kader asal-asalan. Keduanya pernah berkarir menjadi anggota dewan, bahkan wakilnya pernah

¹¹ Jamberita.com, “Muklis-Supardi Calon Pertama Yang Mendaftar ke KPU Tanjabbar”. <https://jamberita.com/read/2020/09/04/5961606/muklis--supardi-paslon-pertama-daftar-kpu-tanjabbar> diakses pada 15 Januari 2023 pukul 10.08 WIB.

menjabat sebagai kepala Desa dua periode hal ini kemudian menjadi pertimbangan bagaimana kedua partai dalam koalisi berkah ini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun jika dianalisis kembali tentunya ada gaya komunikasi dan kesepakatan hingga keputusan untuk mengukung calon ini bisa terjadi. Untuk mengkaji mengenai pola komunikasi politik koalisi berkah ini penulis menghadirkan beberapa peneliti yang penulis anggap masih memiliki relevansi secara substansi dan teori sehingga dapat menjadi referensi penulisan penelitian ini dan mampu menghadirkan sudut pandang baru mengenai komunikasi politik koalisi partai politik dalam pilkada.

Yang pertama peneliti mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syukri dan Ricky Meilandi dengan judul penelitian. *“Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan AW Nofadi Mawardi – Ilyas Panji Alam pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015”*.¹² Penelitian ini terkait dengan Strategi Partai koalisi pasangan AW Noviandi dan Ilyas Panji Alam pada pilkada Di Kabupaten Ogan ilir Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kemenangan Noviandi dan Ilyas Panji Alam di Pilkada OI 2015 tidak lepas dari pengaruh partai pendukung yang menggerakkan kader-kader partai melalui strategi politik ofensif dan defensive berjalan baik dan efektif merangkul masyarakat, mempertahankan masa pemilih tetap maupun pemilih musiman. Persamaan dengan penulisan penelitian ini adalah mengkaji mengenai pemilihan pilkada dan terletak pada objek kajian jika penelitian ini berbicara mengenai kemenangan yang di

¹² Ahmad Syukri, Ricky Meilandi. *“Strategi Partai Koalisi dalam Pemenangan AW Nofadi Mawardi – Ilyas Panji Alam pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015”* Jurnal Studi Sosial dan Politik, FISIP Universitas Rden Fattah Vol. 2 No.1, Juni 2018 (31-43)

hasilkan karena kesolitan parpol pengusung maka pada penelitian ini mengenai komunikasi politik dalam menentukan calon pada pilkada.

Penelitian kedua yang menjadi referensi penulis pada penelitian ini yang ditulis oleh Mufleh yang ditulis dalam skripsinya dengan judul "*Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam*".¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia. Hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan Koalisi Paartai Politik telah menjadi tradisi dalam setiap pemilihan presiden dan wakil presiden ini menjadi ajang bagi para partai politik untuk mendekati diri dengan partai lain yang tujuannya bukan untuk kemajuan negara Indonesia tetapi demi kepentingan partai. Ideologi yang dianut partai politik pun dapat berubah-ubah sesuai dengan proses dalam pemilihan. Persamaan pada penelitian ini mengenai pembahasan partai pada koalisi, perbedaan terletak pada objek penelitian penelitian ini berbicara koalisi berdasarkan pandangan islam sedangkan yg ditulis ini mengenai komunikasi politik penentuan calon.

Ketiga penulis mencatumkan penelitian yang ditulis oleh Farida Isfandiari dan Dwi Tiyanto dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sebelas Maret dengan judul, "*Komunikasi Politik Partai Koalisi Merah Putih Di Daerah*". Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik yang terjadi antara pihak-pihak Koalisi peserta Koalisi Merah Putih di daerah. Persamaan pada penelitian ini dan penelitan yang ditulis adalah memiliki kesamaan pada pola

¹³ Mufleh, "*Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam*" Skrifsi UIN Raden Intan Lampung. 2021

komunikasi yang dilakukan, namun dalam perbedaanya penelitian ini berbicara mengenai komunikasi politik dalam pemenangan di daerah, sedangkan yg ditulis ini mengenai komunikasi politik penentuan calon.

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis tidak menemukan beberapa kesamaan dari objek penelitian yang hendak peneliti teliti, oleh karena itu penulis akan menghadirkan sebuah sudut pandang baru mengenai pola komunikasi politik yang telah di jelaskan dan di gambarkan penulis pada penjelasan diatas. Untuk itu judul penelitian ini adalah *“Komunikasi Politik Koalisi Berkah Dalam Mengusung Pasangan Anwar Sadat-Hairan Pada Pilkada Tanjung Jabung Barat 2020.”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan koalisi berkah dalam memutuskan mengusung pasangan Anwar Sadat dan Hairan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020?
- 1.2.2 Bagaimana Faktor yang mempengaruhi sehingga keputusan ini dapat diambil dan diterima semua anggota Partai koalisi Berkah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh partai politik koalisi berkah dalam mengusung pasangan Anwar Sadat dan Hairan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga keputusan ini dapat diambil dan diterima semua anggota Partai koalisi Berkah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi pada literatur Ilmu Politik, misalnya dalam menganalisis mengenai keputusan komunikasi politik dari sebuah partai koalisi dalam pilkada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk dapat memperkaya informasi mengenai mengenai keputusan komunikasi politik dari sebuah partai koalisi dalam pilkada.

1.5 Landasan Teori

Teori menjadi payung penulis dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi

masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Berikut sejumlah teori yang peneliti gunakan :

1.5.1 Komunikasi Politik

Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi *politicos* yang artinya kewarganegaraan. Dari kata Komunikasi Politik berasal dari kata *politicos* menjadi *politera* yang berarti hak hak kewarganegaraan¹⁴. Menurut Gabriel Almond : "komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. *"All of the functions performed in the political system, political socialisation and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication."*

Komunikasi Politik merupakan sebuah aktivitas komunikasi, baik verbal maupun non verbal, yang memiliki muatan-muatan politik. Menurut Melvin L. Defleur, kita dapat membaca sebuah aktivitas komunikasi kaitannya dengan politik dengan model transaksional simultan. Dengan karakternya yang nonlinear, model ini sekurang-kurangnya menggambarkan tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi politik¹⁵.

¹⁴ Dan nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989),hal.108

¹⁵ Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), hal.4.

Pertama, lingkungan fisik, yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek what dan how pesan-pesan komunikasi itu di pertukarkan. Kedua, situasi sosiokultural, yakni komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang didalamnya terkandung makna kultural tertentu. Ketiga, hubungan sosial, yakni status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri maupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.

1.5.1.1 Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan public opinion atau pendapat umum, dan untuk ikut dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat¹⁶. Terdapat berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi politik, namun bentuk-bentuk yang sudah biasa digunakan oleh para politikus adalah:

1. Retorika Politik

Berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu rhetorica, yang berarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling

¹⁶ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 65.

memengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpersona. Pola retorika elit politik dalam koalisi partai politik dapat berpengaruh pada keputusan bersama koalisi. Pola retorika yang digunakan oleh elit politik dapat mempengaruhi persepsi dan sikap para elit politik lain. Hal ini dapat berdampak pada negosiasi dan *bargaining* yang dilakukan oleh para elit politik dalam koalisi.

Pola retorika elit politik yang efektif dapat membantu para elit politik untuk membangun hubungan dan kepercayaan antar partai politik. Hal ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan koalisi dalam mencapai tujuannya. Sebaliknya, pola retorika elit politik yang tidak efektif dapat menghambat proses negosiasi dan *bargaining*. Hal ini dapat berujung pada kegagalan koalisi dalam mencapai tujuannya.

2. Agitasi Politik

Berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu *agitare*, yang artinya bergerak atau menggerakkan dan dalam bahasa Inggris, *agitation*. Menurut Harbert Blumer yang dikutip oleh Anwar Arifin, Pola agitasi elit politik dalam koalisi partai politik dapat berpengaruh pada keputusan bersama koalisi. Pola agitasi yang digunakan oleh elit politik dapat mempengaruhi persepsi dan sikap para elit politik lain. Hal ini dapat berdampak pada

negosiasi dan bargaining yang dilakukan oleh para elit politik dalam koalisi.

Pola agitasi elit politik yang efektif dapat membantu para elit politik untuk mencapai tujuan koalisi. Misalnya, pola agitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para elit politik terhadap tujuan koalisi. Sebaliknya, pola agitasi elit politik yang tidak efektif dapat menghambat proses negosiasi dan bargaining. Misalnya, pola agitasi yang dilakukan untuk memprovokasi dan memecah belah para elit politik dalam koalisi.

3. Propoganda Politik

Propaganda (menyemaikan tunas suatu tanaman) adalah suatu salah bentuk kegiatan yang sudah lama dalam bidang politik. Penggunaan propaganda politik secara intensif dalam politik adalah dilakukan oleh Hitler (NAZI) dalam perang dunia II. Yaitu dengan melakukan kebohongan dengan cara menyebarkan ideologi NAZI (fasisme) untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Sebelumnya propaganda digunakan dalam bentuk kegiatan keagamaan (umat katolik), yaitu pada tahun 1622, Paus Gregius XV, membentuk suatu komisi cardinal yaitu *congregation de propoganda fide*, untuk menambahkan keimanan kristiani.

4. Kampanye Politik

Ada berbagai macam kampanye politik diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, dengan menggunakan media massa atau disebut juga dengan istilah persuasif massa. Metode ini biasanya dilakukan dalam bentuk “imbauan kepada massa dilakukan baik melalui hubungan tatap muka ataupun melalui jenis media perantara, yaitu: media elektronik, media cetak, atau poster.

Kedua, kampanye interpersonal, adalah kampanye yang dilakukan terhadap diri sendiri atau lebih kepada sikap-sikap pribadi. Hal-hal yang biasanya “dilakukan oleh para kandidat (atau istrinya, kerabat dekat, dan juru bicara utama) dalam setting yang relative informal¹⁷. *Ketiga*, kampanye organisasi. Didalam kampanye organisasi yang dilakukan adalah “mengerahkan anggota, dan memberikan tekanan kepada calon pejabat: serikat buruh, asosiasi perusahaan, kelompok agrikultur, organisasi hak sipil, lobby konsumen, pencinta lingkungan.” Hal tersebut semuanya dilakukan agar suara mengarah kepada kandidat yang berkompetensi dalam pemilu.

1.5.1.2 Strategi Komunikasi Politik

Strategi Komunikasi perlu disusun secara luwes, sehingga taktik operasionalnya komunikasi dapat segera disesuaikan dengan fakto-

¹⁷ *Loc.Cit*, Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, Hlm. 205

faktor yang berpengaruh. Untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif, seorang strategis komunikasi perlu memahami sifat-sifat komunikasi dan pesan, guna dapat menentukan jenis media yang akan diambil dan teknik komunikasi yang akan ditetapkan¹⁸.

Politik dan strategi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan apabila mengejar tujuan berpolitik dalam kemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu strategi juga membutuhkan taktik, prasyarat dalam sebuah perencanaan adalah adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti¹⁹. Jadi perencanaan taktik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Keputusan taktis semacam ini digunakan untuk mencapai setiap tujuan strategis. Keputusan-keputusan ini terutama tergantung pada pengenalan akan ruang lingkup, kerangka prasyarat, dan kemampuan pribadi.

Strategi komunikasi politik dalam konteks pilkada, memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya mengandalkan popularitas maupun posisinya sebagai kandidat incumbent saja, namun ada strategi komunikasi politik yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan tempat dimana kontestasi

¹⁸ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remadja Rosda Karya, 2004), Hal.33.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 38

diselenggarakan²⁰. Apabila untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan pertarungan antar kandidat dalam pilkada.

Strategi komunikasi politik dalam konteks pemerintahan, digunakan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan khususnya di dalam proses pemilihan umum dengan cara meningkatkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya serta menyalurkan kebijakan-kebijakan sebuah komunikasi timbal balik antara suprastruktur dan infrastruktur politik dalam mempersiapkan sebuah pilkada²¹.

1. Tahapan-tahapan dalam strategi Komunikasi Politik

Menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi itu diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut. Menurut para pakar, Tahapan-tahapan strategi komunikasi sebagai berikut:

a. Mengamati permasalahan

Merupakan gabungan dari aktivitas-aktivitas seperti

²⁰ *Ibid*, Onong Uchjana Effendy. Hal. 38

²¹ *Ibid*, Onong Uchjana, Hal. 12

meneliti, mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap serta perilaku masyarakat yang memiliki kepentingan terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan. Sehingga mereka mencari dan berpatokan terhadap karakter public atau masyarakat.

Perencanaan dan Pembuatan Program

Setelah informasi dan data terkumpul, dalam rangka untuk menyusun program, tujuan, tindakan serta strategi komunikasi. Ini dilakukan apabila karakteristik masyarakat sudah diketahunya, karena bagaimanapun perencanaan dan program adalah tahap lanjutan dari tahap pengamatan permasalahan dari kondisi dan situasi di masyarakat.

b. Mengambil Tindakan Berkomunikasi

Bagaimana mendisain citra atau image seefektif mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan pesan-pesan yang disampaikan secara komunikatif²².

c. Evaluasi Program Kerja

Tahap ini adalah mengevaluasi dari semua yang telah dilakukan dari mulai mengamati permasalahan, perencanaan dan program serta pelaksanaan dan komunikasi. Pada tahapan ini maka kita mampu untuk mengetahui bagaimana upaya strategi yang kita lakukan memberika keberhasilan atau

²² *Ibid*, Onong Uchjana, Hlm. 15

malah sebaliknya dalam tahapan evaluasinya²³.

1.5.2 Lobby Politik

Dalam kehidupan politik, lobby merupakan salah satu bagian penting karena adanya berbagai macam kepentingan yang harus diakomodasikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Karena itu lobby politik seringkali dianggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak²⁴. Sementara di dalam sebuah organisasi biasanya lobby dilakukan untuk membujuk pihak-pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Lobi akan selalu menjadi bagian dari sistem politik dan legislatif sebuah negara. Istilah lobi telah banyak didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya lobi adalah hak setiap warga negara atau kelompok kepentingan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah atau kongres dan memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi bagian atau menggagalkan undang-undang²⁵. Menurut Leight L. Thompson dalam bukunya *“The Mind and the Heart of Negotiation”*, para perunding sering terperangkap pada 4 (empat) perangkap utama, yaitu²⁶:

1. *Leaving money on table* (dikenal juga sebagai *“lose-lose” negotiation*,

²³ *Ibid*, Onong Uchjana, Hlm. 16

²⁴ Andries Riesfandhy, *“Lobi Politik Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja DPD RI”*. Makasar :Tesis Ilmu Politik UNHAS, (2021), Hal. 27

²⁵ Ardianto Ardianto dkk, *“Praktik Lobi Dan Negosiasi Oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik”*, Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, 12.1 (2020), Hlm. 25–39

²⁶ Arifah Armi Lubis, *“Sebuah Tinjauan Pustaka Perkembangan Diplomasi Publik”*. Jakarta : Magister Ilmu Komunikasi UMJ, (2016).

yang terjadi saat para perunding gagal mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk menghasilkan “*win-win*” solution.

2. *Setting for too little* (atau dikenal sebagai “kutukan bagi si pemenang”), yang terjadi saat para perunding memberikan konsesi yang terlalu besar, kepada lawan berundingnya dibandingkan dengan yang mereka peroleh.
3. Meninggalkan meja perundingan, yang terjadi saat para perunding menolak tawaran dari pihak lain yang sebenarnya lebih baik dari semua pilihan yang tersedia bagi mereka. Biasanya hal ini terjadi karena terlalu mempertahankan harga diri atau salah perhitungan.
4. *Setting for terms that worse than the alternative* terjadi saat para perunding merasa berkewajiban untuk mencapai kesepakatan, padahal hasil kesepakatan yang dibuat tidak sebaik alternatif yang lain.

Lobi politik dapat disimpulkan berarti sebuah komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang politisi atau petinggi politik lain untuk mempengaruhi kelompok tersebut agar menentukan sebuah keputusan yang dapat menguntungkan pihak pelobi secara politik²⁷. Dalam melakukan lobi, praktik lobi politik ini akan terjadi tawar menawar politik. Maka mempersiapkan sejumlah tawaran kepada pihak yang akan ditemui. Komunikasi politik disini sangat penting yang fungsinya untuk menyelaraskan kepentingan politik masing-masing pihak. Dan juga dinamika organisasi yang semakin besar dan berkembang dan juga persaingan semakin ketat. Dikarenakan organisasi tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan yang berkaitan dengan aktivitas dan

²⁷ *Op.Cit.* Andries Riesfandhy, Hlm. 32

perkembangan organisasi tertentu.

1.5.3 Koalisi Partai Politik

Pada Umumnya koalisi sangat sering diidentikan dengan perpaduan beberapa partai politik baik yang berada pada posisi pemerintahan atau yang berada pada posisi oposisi, namun secara actual praktek koalisi merupakan hal yang umum dalam praktek kehidupan politik sehari-hari bagi suatu organisasi atau kelompok tertentu dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama²⁸. Koalisi terjadi baik dalam konteks formal maupun informal, dalam waktu singkat maupun jangka panjang, dalam ranah public maupun ranah privat atau bahkan kombinasi keduanya, koalisi senantiasa memainkan peran penting yang dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan bersama menuju upaya untuk kebijakan melalui berbagai institusi terkait.

Secara teoritis model koalisi sebenarnya sangat beragam. Model koalisi dapat di bedakan atas tiga katagori, katagori pertama, koalisi pemenang minnimal, menunjuk pada pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana diparlemen. Katagori kedua, koalisi minoritas, koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil dan karena itu tidak mendapat dukungan mayoritas sederhana diparlemen, dan katagori ke tiga. Koalisi besar, menunjuk pada koalisi pemerintahan yang didukung oleh mayoritas mutlak partai politik di parlemen²⁹.

Koalisi politik umumnya terjadi ketika suatu kumpulan organisasi

²⁸ Syamsuddin haris, "*Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*", (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 100.

²⁹ *Ibid*, Syamsuddin haris, hal. 100

ataupun kesatuan bersepakat untuk merealisasikan suatu tujuan yang merupakan tujuan bersama. Koalisi tersebut dapat dibentuk untuk jangka waktu panjang maupun pendek. Tujuan yang diperjuangkan dapat terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang terbentuk dari adanya kesepakatan diantara pelaku koalisi. Kerjasama tersebut dapat terjadi pada saat kampanye politik menuju pemilu atau setelah pemilu dilaksanakan³⁰.

Selain itu bentuk koalisi politik bervariasi tergantung pada alasannya lahirnya, durasi waktu, kepentingan yang diperjuangkan, bentuk dukungan, serta sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara. Koalisi partai sebenarnya lebih lazim dalam konteks sistem parlementer dengan sistem multipartai karena koalisi diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat ketika hasil pemilu parlemen begitu fragmentatif.

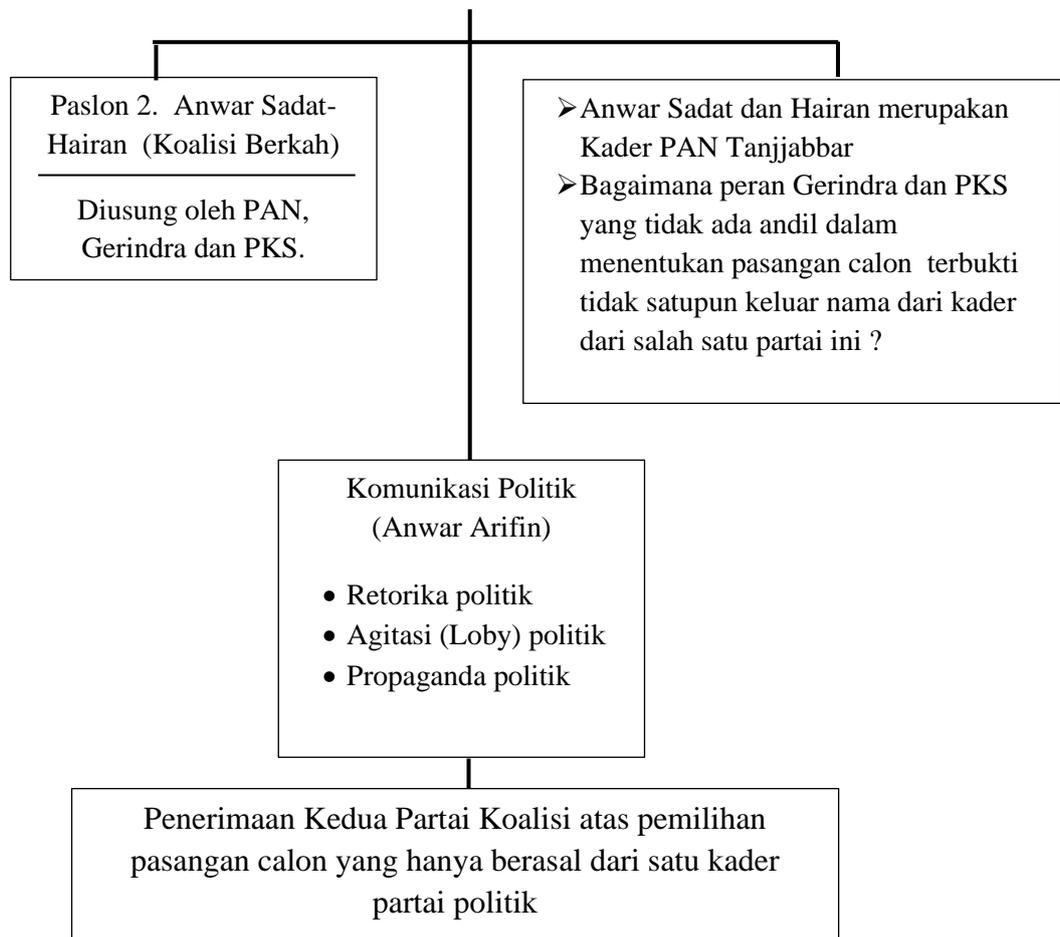
Ada 3 alasan koalisi, pertama, bila koalisi berdasarkan perolehan suara, hukum yang berlaku adalah parpol dengan perolehan suara lebih besar mempunyai bargaining dari pada parpol dengan suara lebih kecil, kedua, bila koalisi berdasarkan kesamaan ideologi, akan terjadi koalisi parpol yang mengklaim berdasarkan ideologi nasionalis, ideologi kiri dan ideologi islam. Ketiga, kemungkinan terjadi koalisi berdasarkan platform yaitu yang penting menang³¹

1.6 Kerangka Pikir

**Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung
Barat tahun 2020**

³⁰ *Ibid*, Syamsuddin haris, hal. 156

³¹ Novi Rahmawanta, *Siapa mau Jadi Presiden*, (Jakarta; Kompas, 2004), hal. 173-174



Berdasarkan keterangan pada alur kerangka pikir yang telah penulis jabarkan diatas, penulis kembali menegaskan jika penulis memfokuskan pada penelitian mengenai bagaimana pola komunikasi koalisi berkah dalam memutuskan untuk mencalonkan dua kader yang hanya berada dalam satu partai padahal prinsip koalisi pada penjelasan teori koalisi diatas sangat jelas menyatakan bahwa koalisi adalah memiliki asas keadilan serta pembagian yang sama tanpa ada sedikitpun yang mengurangi atau merugikan salah satu anggota koalisi tersebut. Untuk itu perlu di

galih lebih jauh bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh koalisi berkah dalam mengukung pasangan Anwar Sadat dan Harian.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah³². Penelitian survey digunakan untuk melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisisioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagiannya. Selanjutnya penelitian naturalistik kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah yaitu lapangan dan mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

1.7.2 Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan pada penelitian mengenai bagaimana pola komunikasi koalisi berkah dalam memutuskan untuk mencalonkan dua kader yang hanya berada dalam satu partai padahal prinsip koalisi pada penjelasan teori koalisi diatas sangat jelas menyatakan bahwa koalisi adalah memiliki asas

³² Le xy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm 6

keadilan serta pembagian yang sama tanpa ada sedikitpun yang mengurangi atau merugikan salah satu anggota koalisi tersebut.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena fokus penelitian memfokuskan pada pola keputusan koalisi berkah pada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 lalu.

1.7.4 Sumber Data

1. Data Skunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang dibutuhkan dalam data penelitian yang dilakukan³³. Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu agar penulis mampu menganalisis dari penelitian ini.

2. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, Data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara)

³³ *Ibid*, Lexy J. Moleong. Hlm. 132

atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti³⁴. Pada tahapan ini penulis langsung menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.³⁵. Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini yang meliputi :

Tabel. 1.7.5
Daftar Informan

No	Informan	Alasan
1	Tim Pemenangan Koalisi Berkah	Mengetahui mekanisme internal dalam proses menentukan pasangan calon.
2	Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Barat	Partai pengusung dan terlibat dalam mekanisme internal pada proses menentukan pasangan calon.
3	Ketua DPC Gerindra Tanjung Jabung Barat	Partai Koalisi dan terlibat dalam mekanisme internal pada proses menentukan pasangan calon.
4	Ketua DPD PKS Tanjung Jabung Barat	Partai Koalisi dan terlibat dalam mekanisme internal pada proses menentukan pasangan calon.
5	Tim Pemenangan Koalisi Mulia Pasangan No. 1	Sebagai data pembanding dalam menentukan pasangan calon.
6	Tim Pemenangan Koalisi Beda Pasangan No. 3	Sebagai data pembanding dalam menentukan pasangan calon.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 209.

³⁵ *Ibid*, Jonathan Sarwono. Hlm, 156

7	Pengamat Politik Tanjung Jabung Barat	Sebagai tokoh yang memahami dinamika perpolitikan di Tanjung Jabung Barat.
---	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Sumber : Tabel diolah penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menemukan data, penulis akan melakukan wawancara, observasi dan kepustakaan/dokumen. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data sebagai bukti dalam penelitian. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data yang peneliti pilih, yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur³⁶. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Juga menggunakan wawancara semi-struktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya³⁷.

b) Dokumentasi

³⁶ *Ibid*, Jonathan Sarwono. Hlm, 186

³⁷ Op.cit. Sugiyono. Hlm. 233

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³⁸. Peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Dijelaskan dalam buku karya Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Penyajian adalah menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan penelitian.

³⁸ *Op.cit.* Sugiyono, hlm.248

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, mengecek kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas pengumpulan data dan berbagai sumber data³⁹. Terdapat empat tipe triangulasi yaitu :

- a) Trigulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
- b) Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian.
- c) Triangulasi Teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.

Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.

³⁹ *Op.cit.* Sugiyono, hlm.241